



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2013 mengenai penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 yang belum memadai, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Plt. Sekretaris Daerah untuk merevisi Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2011, terkait dengan penyelesaian permasalahan dana bergulir yang tidak ada rincian pemanfaat dan selisih kurang saldo dana bergulir yang tidak teridentifikasi.
- KEDUA : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Penanggung Jawab Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) untuk :
- a. membuat rencana penagihan dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) secara detail mengenai waktu, sasaran pengguna dana dan tahapan pelaksanaan prosedur kerja; dan

b. melakukan Monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil penyelesaian permasalahan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta